

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Upaya Pemerintah Provinsi Banten Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Muhammad Pasha Fathurilham¹, Muhammad Zaki Maulana²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: mpashafathurilham01@gmail.com¹, muhamadzakimaulana89@gmail.com²

Article History:

Received: 10 Januari 2026

Revised: 19 Januari 2026

Accepted: 25 Januari 2026

Keywords: *Makan bergizi gratis, Gizi anak, Kebijakan publik, Kesejahteraan sosial, Banten.*

Abstract: *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, serta mendukung kesejahteraan sosial. Pemerintah Provinsi Banten sebagai salah satu daerah pelaksana menghadapi berbagai tantangan mulai dari kesiapan regulasi, disparitas harga pangan, kapasitas logistik, hingga koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review untuk menganalisis implementasi MBG di Provinsi Banten berdasarkan temuan-temuan akademik terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah masih belum optimal, khususnya dalam aspek pendanaan, konsistensi kebijakan, serta kesiapan sarana produksi pangan bergizi. Tantangan juga muncul pada dinamika harga beras medium yang mempengaruhi biaya penyediaan menu, rendahnya konsumsi susu pada siswa, serta belum meratanya pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan. Oleh karena itu, strategi implementasi yang lebih komprehensif diperlukan melalui penguatan regulasi, peningkatan stabilitas harga pangan, pemberdayaan koperasi dan UMKM lokal, serta pengawasan keamanan pangan demi menjamin terpenuhinya hak anak atas makanan aman dan sehat.*

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat ketahanan gizi nasional. Sebagai bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, program ini digagas untuk menjamin pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus memberdayakan produsen pangan lokal agar tercipta pemerataan ekonomi dari desa hingga kota (Putra & Marsal, 2025). Implementasi program ini juga mendapatkan dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan tata kelola pangan bergizi, pengawasan keamanan pangan, serta koordinasi lintas sektor (Hakim & Yuliana, 2025).

Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah dengan populasi siswa yang cukup besar dan

karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, menghadapi tantangan dalam implementasi MBG. Kajian Rosidin, Maulana & Dharmawan (2025) menyebutkan bahwa tantangan utama terletak pada kesiapan infrastruktur, disparitas harga bahan pangan, kesenjangan kualitas distribusi, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga daerah. Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat Banten memiliki daerah perkotaan padat serta wilayah pedesaan dan kepulauan dengan tingkat akses pangan bergizi yang berbeda.

Faktor ketahanan pangan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program. Disparitas harga beras medium terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) memicu peningkatan biaya penyediaan menu harian, yang pada akhirnya membebani anggaran operasional MBG (Mahdi & Rianzani, 2025). Selain itu, perilaku konsumsi pangan peserta didik di Banten juga masih menunjukkan pola yang belum ideal. Penelitian Maula dkk. (2025) menunjukkan bahwa konsumsi susu harian siswa SMA di Cilegon masih rendah, menggambarkan bahwa intervensi gizi belum merata di tingkat daerah. Rendahnya literasi gizi ini berpotensi menghambat efektivitas program MBG jika tidak dibarengi pendidikan gizi dan pembiasaan pola makan sehat.

No	Faktor Utama	Temuan Penelitian	Sumber
1.	Disparitas Harga Pangan	Harga beras melebihi HET dan memicu inflasi pangan	Mahdi & Rianzani (2025)
2.	Pola Konsumsi Gizi Anak	Konsumsi susu harian siswa SMA di Cilegon masih rendah	Maula et al. (2025)
3.	Infrastruktur dan Distribusi	Koordinasi dan kesiapan infrastruktur MBG di Banten belum optimal	Rosidin, Maulana & Dharmawan (2025)
4.	Potensi Ekonomi Lokal	Koperasi dapat menjadi pilar penyedia bahan pangan MBG	Pinasti & Alfarizi (2025)
5.	Dampak Ekonomi Lokal	MBG mendorong kesehatan anak & ekonomi lokal	Widyasari et al. (2025)
6.	Keamanan Pangan	Terdapat kasus keracunan makanan pada program makan gratis	Riyanto & Sinaga (2025)
7.	Ketahanan Gizi Nasional	Ketahanan gizi butuh rantai pasok aman & terstandar	Da Conceição Savio et al. (2025)

Tabel 1. Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Di sisi lain, implementasi MBG memiliki potensi besar bagi pemberdayaan ekonomi lokal.

Peluang ini dapat dimaksimalkan melalui penguatan UMKM, koperasi, serta kelompok produsen pangan lokal sebagai penyedia bahan dasar makanan (Pinasti & Alfarizi, 2025). Penelitian Widyasari, Larasati & Alam (2025) bahkan menegaskan bahwa program makan bergizi di sekolah dasar tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga mendorong kebangkitan ekonomi lokal apabila rantai pasok melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM di daerah.

Namun, berbagai dinamika sosial-politik turut mempengaruhi penerimaan masyarakat dan pola implementasi program. MBG tidak hanya dipahami sebagai kebijakan kesehatan, tetapi juga bagian dari kebijakan pembangunan sosial yang diperdebatkan dalam konteks politik hukum dan efektivitas penggunaan anggaran negara (Kiftiyah dkk., 2025; Putra & Marsal, 2025). Ketidakpastian hukum mengenai sumber pendanaan alternatif, misalnya melalui pemanfaatan dana zakat, juga menjadi perbincangan di kalangan akademisi dan praktisi (Virlana & Tjoneng, 2025).

Aspek perlindungan anak menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG. Kasus keracunan makanan dalam beberapa program makan gratis di beberapa daerah menjadi pelajaran penting bahwa pengawasan keamanan pangan harus dilakukan secara ketat agar hak anak atas makanan aman dan sehat tetap terjamin (Riyanto & Sinaga, 2025). Hal ini sejalan dengan upaya nasional memperkuat ketahanan gizi melalui strategi ekonomi kesehatan yang menekankan pentingnya rantai pasok pangan aman dan terstandar (da Conceição Savio dkk., 2025).

Meskipun MBG telah menjadi program prioritas nasional, penelitian terkait implementasinya di Provinsi Banten masih sangat terbatas. Rosidin, Maulana & Dharmawan (2025) memang telah mengkaji tantangan teknis dan strategis implementasi program di Banten, namun kajian lebih lanjut diperlukan mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola aspek koordinasi, pemenuhan kebutuhan logistik, pemberdayaan ekonomi lokal, keamanan pangan, serta kesiapan kebijakan pendukung lainnya. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur mengenai implementasi MBG di Banten secara komprehensif dan berbasis bukti akademik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* (SLR), yaitu pendekatan yang bertujuan mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, serta mensintesis penelitian-penelitian yang relevan secara sistematis berdasarkan topik tertentu. Metode ini dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat dengan memanfaatkan sumber pustaka yang telah dipublikasikan, sehingga sesuai untuk mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten yang masih terbatas penelitian lapangannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran jurnal nasional dan internasional, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan regulasi resmi yang berkaitan dengan isu gizi, kebijakan publik, ketahanan pangan, serta implementasi MBG di tingkat nasional maupun daerah. Seluruh sumber diperoleh dari basis data daring seperti Google Scholar, ResearchGate, SpringerLink, dan portal jurnal perguruan tinggi. Pencarian menggunakan kata kunci: “makan bergizi gratis”, “implementasi kebijakan gizi”, “Banten”, “ketahanan gizi nasional”, “kebijakan publik gizi”, “disparitas harga pangan”, “perlindungan anak”, “program makan sekolah”.

Sumber pustaka yang digunakan harus memenuhi kriteria inklusi, yaitu:

- a) Dipublikasikan dalam rentang 2022–2025 untuk menjamin relevansi dengan kondisi implementasi MBG,
 - b) Membahas langsung atau tidak langsung aspek kebijakan makan bergizi gratis, ketahanan pangan, kesehatan anak, atau pemberdayaan ekonomi lokal,
-

- c) Memuat data empiris, analisis kebijakan, atau kajian teoretis yang dapat digunakan untuk menyusun argumen penelitian.

Selain itu, dokumen regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta sumber hukum lain turut dianalisis untuk memahami kerangka legal implementasi MBG (Hakim & Yuliana, 2025). Proses seleksi dilakukan melalui tiga tahap: screening judul dan abstrak, pembacaan keseluruhan dokumen, dan penilaian relevansi berdasarkan kerangka penelitian.

Setiap literatur kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait tantangan implementasi, kesiapan daerah, dinamika kebijakan, ketahanan pangan, serta implikasi sosial ekonomi dari program MBG. Sintesis temuan dilakukan secara naratif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dirancang sebagai strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemenuhan gizi bagi anak sekolah. Dalam perspektif pembangunan sosial, program ini tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen proteksi sosial yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Sejalan dengan pandangan da Conceição Savio dkk. (2025), ketahanan gizi merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa, karena kesehatan dan kualitas sumber daya manusia berkontribusi langsung pada produktivitas dan masa depan ekonomi nasional. Dengan demikian, MBG menjadi bagian dari upaya negara memperkuat modal manusia (human capital) yang berkelanjutan.

Dalam konteks implementasi di Provinsi Banten, program MBG dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, mulai dari kawasan industri seperti Cilegon hingga wilayah pedesaan dan kepulauan di Pandeglang serta Lebak. Rosidin, Maulana & Dharmawan (2025) mengidentifikasi bahwa tantangan utama pelaksanaan MBG di Banten meliputi ketidaksiapan infrastruktur, ketidakseimbangan kapasitas produksi pangan bergizi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Program ini dalam praktiknya belum mampu mengakomodasi kebutuhan gizi semua peserta didik secara seragam karena perbedaan akses pangan, terutama di wilayah dengan infrastruktur distribusi terbatas.

Selain aspek infrastruktur, dinamika harga pangan menjadi salah satu faktor penentu. Mahdi & Rianzani (2025) menjelaskan bahwa disparitas harga beras medium terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi pangan. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap biaya penyediaan menu MBG yang umumnya mengandalkan beras sebagai sumber karbohidrat utama. Ketidakstabilan harga menciptakan beban tambahan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penyediaan makanan bergizi yang konsisten dan memenuhi standar gizi.

Sementara itu, kondisi gizi dan kebiasaan makan peserta didik turut menjadi tantangan tersendiri. Studi Maula dkk. (2025) mengenai pola konsumsi susu siswa SMA di Cilegon menunjukkan rendahnya minat dan kebiasaan minum susu harian. Temuan ini mengindikasikan bahwa MBG perlu diiringi edukasi gizi agar perubahan perilaku dapat tercapai. Program makan gratis tanpa pendidikan gizi akan sulit mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan anak secara signifikan. Oleh karena itu, intervensi MBG harus menekankan aspek pendidikan gizi di sekolah

.....

sebagai bagian integral dari program.

Dalam perspektif perlindungan anak, pastikan bahwa pelaksanaan MBG selalu memprioritaskan keamanan pangan. Riyanto & Sinaga (2025) menegaskan bahwa hak anak atas makanan sehat dan aman merupakan tanggung jawab negara, terutama setelah beberapa kasus keracunan makanan di program makan gratis di daerah lain. Pengawasan keamanan pangan harus diperketat mulai dari proses produksi, distribusi, hingga penyajian di sekolah agar keberadaan program tidak justru membahayakan anak.

Program MBG juga memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui integrasi UMKM, petani, dan koperasi daerah sebagai pemasok bahan pangan. Pinasti & Alfarizi (2025) menyebutkan bahwa koperasi dapat menjadi pilar pengadaan pangan bergizi gratis karena memiliki struktur yang memungkinkan partisipasi kolektif serta penguatan ekonomi masyarakat. Dengan mengintegrasikan pelaku ekonomi lokal, program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak tetapi juga menjadi motor pembangunan ekonomi daerah.

Namun, dinamika politik dan hukum turut mewarnai implementasi program ini. Kiftiyah dkk. (2025) menyoroti bahwa MBG juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik terkait anggaran, prioritas pembangunan, dan persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan. Selain itu, perdebatan mengenai legalitas pemanfaatan dana zakat untuk program MBG (Virlana & Tjoneng, 2025) menunjukkan bahwa aspek pembiayaan program masih menjadi isu strategis yang membutuhkan kejelasan hukum. Hal ini diperkuat oleh Putra & Marsal (2025) yang menjelaskan bahwa politik hukum MBG berkaitan erat dengan visi pembangunan jangka panjang, terutama menuju Indonesia Emas 2045.

Secara konseptual, implementasi MBG dapat dipandang sebagai upaya negara merealisasikan kesejahteraan sosial melalui perbaikan gizi, pengurangan kesenjangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun dalam praktik di Provinsi Banten, berbagai tantangan struktural masih membatasi efektivitas program. Dengan demikian, diperlukan integrasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pelaksanaan MBG dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Relasi antara Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dan Peran Pemerintah Daerah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan konkuren dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berfungsi sebagai garda depan (frontliner) dalam memastikan program nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Implementasi MBG tidak hanya membutuhkan komitmen politik, tetapi juga kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor di tingkat daerah.

Studi Rosidin, Maulana & Dharmawan (2025) menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten menghadapi sejumlah tantangan struktural dalam implementasi MBG, mulai dari kesenjangan kapasitas logistik, ketidaksiapan regulasi turunannya, hingga lemahnya koordinasi antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi langkah operasional yang terukur dan berkelanjutan.

Peran pemerintah daerah juga berkaitan erat dengan dinamika harga pangan. Sebagaimana diuraikan oleh Mahdi & Rianzani (2025), disparitas harga beras medium terhadap HET mempengaruhi stabilitas inflasi pangan. Pemerintah daerah melalui perangkatnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah, termasuk melalui operasi pasar, dukungan distribusi, hingga optimalisasi peran Bulog. Ketika pemerintah daerah tidak mampu

.....

mengendalikan fluktuasi harga pangan, pelaksanaan MBG akan mengalami tekanan anggaran yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program gizi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah daerah berperan dalam memastikan kualitas gizi yang disajikan. Temuan Maula dkk. (2025) mengenai rendahnya konsumsi susu harian di Cilegon menunjukkan bahwa aspek edukasi gizi perlu diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah. MBG hanya akan efektif apabila pemerintah daerah mampu menerapkan kebijakan gizi yang komprehensif, bukan sekadar menyediakan makanan tetapi juga membangun budaya makan sehat di sekolah.

Dalam aspek perlindungan anak, pemerintah daerah memegang tanggung jawab besar terhadap keamanan pangan. Kasus keracunan makanan dalam program makan gratis di beberapa wilayah Indonesia (Riyanto & Sinaga, 2025) menjadi bukti bahwa pengawasan keamanan pangan harus diperketat mulai dari hulu hingga hilir. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pemasok makanan, tempat produksi, dan proses distribusi memenuhi standar kesehatan dan higiene. Kegagalan dalam aspek ini bukan hanya menghambat program, tetapi juga dapat melanggar hak anak atas makanan yang aman dan sehat.

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi lokal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menghubungkan program MBG dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian Pinasti & Alfarizi (2025) menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi pilar penyedia pangan bergizi melalui integrasi petani, nelayan, dan UMKM lokal. Pemerintah daerah yang aktif memberdayakan koperasi dapat menciptakan rantai pasok lokal yang berkelanjutan dan memperkuat ekonomi mikro di Banten. Hal ini sejalan dengan temuan Widyasari, Larasati & Alam (2025) bahwa program makan di sekolah dapat meningkatkan keterlibatan produsen lokal apabila dirancang dengan pendekatan ekonomi komunitas.

Namun, dinamika sosial-politik turut berpengaruh terhadap sikap pemerintah daerah dalam mengimplementasikan MBG. Dzakiyah dkk. (2025) menunjukkan bahwa MBG juga menjadi bagian dari strategi komunikasi politik pemerintah pusat yang melibatkan pemerintah daerah dalam pembentukan citra keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Hal ini menempatkan pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai bagian dari arena politik yang mempengaruhi persepsi publik.

Dari sisi hukum, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kejelasan regulasi pembiayaan. Perdebatan mengenai penggunaan dana zakat sebagai sumber pendanaan MBG (Virlana & Tjoneng, 2025) memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memerlukan landasan hukum yang kuat untuk mengelola sumber dana. Tanpa kepastian hukum, pemerintah daerah berisiko menghadapi kendala administratif dan audit. Oleh karena itu, arah kebijakan harus konsisten dengan prinsip politik hukum nasional sebagaimana dijelaskan Putra & Marsal (2025).

Secara keseluruhan, relasi antara implementasi MBG dan peran pemerintah daerah bersifat timbal balik. Program ini dapat berhasil apabila pemerintah daerah:

1. Memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat,
2. Mampu menjaga stabilitas harga pangan,
3. Menjamin keamanan pangan,
4. Memberdayakan ekonomi lokal, dan
5. Mengelola dinamika hukum serta politik kebijakan secara tepat.

C. Standar dan Sasaran Kebijakan Program MBG

Keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat ditentukan oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. Dalam konteks kebijakan publik, standar dan sasaran merupakan pedoman utama bagi para pelaksana untuk

.....

memahami arah dan tujuan dari program yang dijalankan. Ketidakjelasan sasaran sering menjadi penyebab kegagalan implementasi karena pelaksana tidak memiliki acuan yang jelas mengenai hasil yang ingin dicapai. Rosidin, Maulana & Dharmawan (2025) menegaskan bahwa di Provinsi Banten, salah satu tantangan awal implementasi MBG adalah belum meratanya pemahaman instansi pelaksana mengenai sasaran kebijakan, termasuk mekanisme penentuan sekolah prioritas, standar menu, dan indikator keberhasilan.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 telah memberikan pedoman nasional terkait tata kelola MBG, namun pemerintah daerah tetap harus menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar kebijakan dapat diterjemahkan secara operasional (Hakim & Yuliana, 2025). Dalam konteks Banten, standardisasi menu dan kandungan gizi menjadi fokus prioritas, terutama karena disparitas kualitas pangan antarwilayah cukup tinggi akibat perbedaan rantai pasok dan kondisi geografis. Widayari, Larasati & Alam (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan program makan bergizi di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh kesesuaian standar gizi dengan kebutuhan anak, serta konsistensi penyediaan menu yang aman dan bervariasi.

Di samping itu, sasaran kebijakan harus mencakup bukan hanya pemberian makanan, tetapi juga peningkatan literasi gizi dan perubahan perilaku makan anak. Hal ini penting karena penelitian Maula dkk. (2025) menunjukkan rendahnya konsumsi susu dan makanan bergizi pada remaja di Banten, yang mengindikasikan perlunya intervensi edukatif jangka panjang. Dengan demikian, sasaran MBG harus dirumuskan secara komprehensif: memenuhi gizi, meningkatkan kesehatan, membentuk kebiasaan makan sehat, dan memperkuat ketahanan gizi daerah.

D. Sumber Daya Pendukung Implementasi MBG

Sumber daya merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan kapasitas kelembagaan akan sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan MBG. Menurut Rosidin, Maulana & Dharmawan (2025), hambatan utama implementasi MBG di Banten terletak pada keterbatasan sumber daya, khususnya tenaga pelaksana, fasilitas produksi pangan, dan distribusi logistik.

Dalam aspek sumber daya manusia, tenaga ahli seperti ahli gizi, penyuluh kesehatan, pengawas keamanan pangan, dan petugas sekolah menjadi kunci utama kelancaran program. Namun, distribusi tenaga tersebut belum merata di seluruh wilayah Banten, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Keterbatasan tenaga ahli ini juga berdampak pada lemahnya pengawasan standar gizi dan keamanan pangan, sebagaimana diperingatkan oleh Riyanto & Sinaga (2025) terkait pentingnya mencegah risiko keracunan makanan dalam program makan gratis.

Dari sisi anggaran, pemerintah daerah harus memastikan kecukupan pembiayaan untuk penyediaan makanan, insentif tenaga pelaksana, serta pengembangan fasilitas pendukung. Tantangan ekonomi muncul ketika harga komoditas pangan berfluktuasi. Mahdi & Rianzani (2025) mencatat bahwa disparitas harga beras medium memengaruhi biaya operasional program secara signifikan, sehingga diperlukan mekanisme stabilisasi harga atau subsidi untuk menjaga keberlanjutan program.

Dalam aspek sarana dan prasarana, kesiapan dapur umum, fasilitas penyimpanan bahan pangan, alat distribusi, serta jaringan pemasok lokal menjadi kunci. Studi Pinasti & Alfarizi (2025) mengungkapkan bahwa koperasi dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal karena struktur kelembagaan koperasi mampu menyediakan pangan secara kolektif dan berkelanjutan. Kesiapan fasilitas tersebut sangat menentukan ketepatan waktu dan kualitas makanan yang disajikan kepada peserta didik.

E. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi antarinstansi merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan. Van

Meter dan Van Horn (dalam Rosidin, Maulana & Dharmawan, 2025) menjelaskan bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada tiga aspek komunikasi: transmission, clarity, dan consistency. Ketiga aspek ini menjadi tantangan utama bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam merealisasikan MBG.

I. Aspek transmission

Aspek transmission menekankan pentingnya penyampaian informasi kebijakan secara tepat kepada semua pihak, mulai dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, sekolah, penyedia pangan, hingga masyarakat. Studi Rosidin, Maulana & Dharmawan (2025) menemukan bahwa penyampaian informasi mengenai mekanisme pelaksanaan MBG belum merata sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana lapangan.

II. Aspek clarity

Aspek clarity menyangkut kejelasan instruksi atau petunjuk teknis. Instruksi yang tidak jelas dapat menyebabkan perbedaan penafsiran, terutama dalam hal penentuan menu, penghitungan biaya, dan standar kelayakan pangan. Ketidakjelasan ini dapat berujung pada inkonsistensi kualitas makanan yang diberikan di berbagai sekolah. Hal serupa pernah ditemukan dalam penelitian program kebijakan lain, seperti yang dicatat Cahyani & Puspaningtyas (2023), bahwa pelaksana membutuhkan instruksi yang tegas untuk menghindari interpretasi ganda.

III. Aspek consistency

Aspek consistency terkait dengan konsistensi kebijakan dan informasi dari pemerintah daerah. Ketidakstabilan kebijakan atau perubahan instruksi yang mendadak dapat menghambat kelancaran pelaksanaan. Dalam konteks MBG, perubahan harga pangan dan dinamika politik sering memicu penyesuaian kebijakan yang tidak selalu dikomunikasikan secara simultan ke seluruh pelaksana (Dzakiyah dkk., 2025).

Dengan demikian, komunikasi yang efektif antarinstansi merupakan elemen kunci yang menentukan kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis di Banten. Tanpa koordinasi yang kuat, implementasi kebijakan akan berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi.

KESIMPULAN (Times New Roman, size 12)

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan, gizi, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai bagian dari program prioritas nasional, MBG memiliki potensi besar untuk memperbaiki status gizi anak sekolah, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, berbagai tantangan struktural masih membatasi efektivitas pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil analisis, tantangan utama implementasi MBG di Banten meliputi ketidaksiapan infrastruktur pendukung, keterbatasan sumber daya manusia, fluktuasi harga pangan, serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Disparitas harga beras medium terhadap HET terbukti memberikan tekanan pada biaya operasional program, sehingga memerlukan kebijakan stabilisasi harga yang lebih adaptif. Selain itu, rendahnya literasi gizi masyarakat seperti rendahnya konsumsi susu pada peserta didik menunjukkan bahwa intervensi MBG tidak boleh hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi harus disertai edukasi gizi yang berkelanjutan.

Aspek perlindungan anak juga menjadi perhatian penting, terutama terkait keamanan pangan yang harus dijaga secara ketat untuk mencegah risiko keracunan makanan di sekolah. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengawasan ketat melalui sinergi dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan penyedia pangan. Di sisi lain, peluang penguatan ekonomi lokal melalui

integrasi koperasi, UMKM, dan petani lokal harus dimaksimalkan agar MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan program MBG, pemerintah daerah perlu memperkuat standar dan sasaran kebijakan, menyediakan sumber daya yang memadai, serta meningkatkan komunikasi antar badan pelaksana secara terstruktur dan berkesinambungan. Implementasi MBG harus dipandang sebagai upaya multidimensional yang memadukan aspek gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta politik hukum. Dengan strategi yang terintegrasi, Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten dapat menjadi model keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI (Times New Roman, size 12)

- Bangun, D. Y. B., Hutapea, D. J. C. D. V., Nainggolan, G. A., Nainggolan, J. A., Pasaribu, S. O., & Hadiningrum, S. (2025). Peran pemerintah desa dalam penanggulangan stunting ditinjau berdasarkan perspektif hukum dan kebijakan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Warga*, 2(1), 721–729.
- Cahyani, M., & Puspaningtyas, A. (2023). Evaluasi program membaca private dalam upaya peningkatan kemampuan membaca siswa di SD Kusuma Putra. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4), 322–334.
- Da Conceição Savio, E., do Carmo, O. M. O., Langoday, T. O., Lay, A. S. Y., Lemaking, V. B., Exposto, L. A. S., ... & Supadi, Y. M. (2025). *Ekonomi kesehatan dan ketahanan gizi: Fondasi membangun bangsa*. PT Star Digital Publishing.
- Dzakiyah, A. N., Andryandy, T., Kuswanto, F. R. H., & Syahrevi, I. (2025). Strategi public relations politik pemerintahan Prabowo dalam program makan bergizi gratis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6885–6899.
- Febryanti, I., Indiati, I., Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Studi pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang). *Dialog: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–79.
- Hakim, B. N., & Yuliana, W. (2025). Implikasi yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap program tata kelola makan bergizi gratis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(2), 267–283.
- Iskawati, E., & Jatmika, S. (2019). *When health meet culture & religion*. Samudra Biru.
- Junus, N., & Mamu, K. (2022). Pelatihan pemanfaatan buah pisang sebagai makanan pencegah stunting berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang di Desa Lamu. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 2(1), 1–12.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112.
- Komara, C. P., Pitriani, S., Sari, D. S., & Yulianti, D. (2025). Program makan bergizi gratis di tengah krisis food waste. *Jurnal Elektronik Ilmu Sosial dan Politik (E-SOSPOL)*, 12(2), 379–391.
-

- Kusumastuti, S. Y., Judijanto, L., Kunawangsih, T., & Sa'dianoor, S. D. (2025). *Ekonomi pembangunan lanjutan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025). Kebijakan makan bergizi gratis dan relevansinya terhadap nilai-nilai good governance: Analisis kualitatif dalam administrasi publik. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 937–945
- Lestari, A. W. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 tentang sekolah ramah anak di SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 4(1), 20–38.
- Mahdi, N. N., & Rianzani, C. (2025). Disparitas harga beras medium terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan implikasinya terhadap inflasi pangan di Indonesia. *AGRIFITIA: Journal of Agribusiness Plantation*, 5(2), 132–143.
- Maula, M. R. H., Nisa, N. S., Hasibuan, D. A., Mardiyanti, E., & Wijaya, G. H. (2025). Daily milk consumption of public high school students in Cilegon City. *TASTECH*, 1(1).
- Nainggolan, P. P., Katharina, R., Buhaerah, P., Rudiastuti, A. W., & Apriani, T. (2025). Relocating Indonesia's capital city: The struggle for power and resources in Borneo. Springer Nature.
- Nissa, A. K., Candra, M., Humairoh, T., & Gusyuliandari, S. (2025). Kebijakan makanan bergizi gratis: Analisis ekonomi politik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus SMP Negeri 4 Tanjungpinang). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Pinasti, T. P., & Alfarizi, L. M. (2025). Koperasi sebagai pilar pengadaan makanan bergizi gratis. *Jurnal Juridisch*, 3(2), 130–141.
- Putra, S. F., & Marsal, I. (2025). Politik hukum kebijakan makan bergizi gratis: Pembebanan APBN atau menuju Indonesia Emas 2045. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7106–7120.
- Ramadhan, N. R., & Tando, C. E. (2025). Implementasi program budidaya tanaman pangan melalui pemanfaatan lahan terhadap upaya ketahanan pangan di LPKA Kelas I Medan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4140–4156.
- Rama, N. R. (2025). Kajian yuridis terhadap program makan bergizi gratis: Studi komparatif implementasi dan dampaknya di Jepang, China, India, dan Indonesia (Disertasi doktoral). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, 4(1), 1–10.
- Rojabi, M. A. (2025). *Mitra BGN: Syarat, cara daftar online, dan kunci lolos verifikasi program makan bergizi gratis*. Afdan Rojabi Publisher.
- Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). Tantangan dan strategi implementasi program makan bergizi gratis: Studi kasus pemerintah daerah Provinsi Banten. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 3(2), 131–143.
- Sadubun, J. A., Tuanaya, W., & Latuconsina, N. (2022). Implementasi pendidikan gratis di Sekolah Dasar Inpres Nania dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 69–76.
- Singi, A. P. (2025). *Orde Indonesia Raya: Sejarah, politik, dan arah baru kepemimpinan nasional*.
-

Divya Media Pustaka.

- Virlana, B., & Tjoneng, A. (2025). Kepastian hukum program makan bergizi gratis: Kajian atas usulan pemanfaatan dana zakat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 57–82.
- Wicaksono, I. A., Susilo, A. K., Fathoni, M. M., Nugroho, A., & Hutasoit, H. P. (2025). Strategi logistik maritim untuk ketahanan gizi nasional: Peran TNI AL dalam program makan bergizi gratis. *Indonesia Emas Group*.
- Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 1727–1736.
- Zulaikhah, S. R., Aniuranti, A., & Handoko, R. T. (2025). Pelatihan pembuatan yoghurt drink untuk membekali keterampilan santri di Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(2), 261–265.
-